



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

DAMPAK PEMEKARAN DAERAH TERHADAP KELESTARIAN HUTAN

Sony Hendra Permana
Analisis Legislatif Ahli Madya
sony.hendra@dpr.go.id

Firyal Nabihah
Analisis Legislatif Ahli Pertama
firyal.nabihah@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pemekaran wilayah yang melahirkan Provinsi Papua Barat Daya membawa konsekuensi signifikan terhadap lingkungan, terutama dalam hal penurunan luas kawasan hutan. Sebelum pemekaran, Provinsi Papua Barat sesuai Surat Keputusan (SK) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 783 Tahun 2014 memiliki kawasan hutan seluas 9,7 juta hektare. Namun, setelah pemisahan wilayah, luas hutan di Papua Barat turun menjadi 6,3 juta hektare. Pengurangan ini disebabkan oleh pembagian wilayah administratif, yang tidak hanya memengaruhi tata kelola lingkungan tetapi juga menambah kompleksitas dalam menjaga keanekaragaman hayati dan keberlanjutan ekosistem.

Penurunan luas hutan ini menjadi tantangan besar mengingat kawasan hutan Papua memiliki peran penting dalam menyerap karbon, menjaga stabilitas iklim, dan menjadi habitat flora dan fauna endemik. Salah satu isu kritis adalah ancaman terhadap tutupan hutan yang dapat meningkatkan risiko deforestasi, degradasi lahan, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Situasi ini juga berpotensi memengaruhi kehidupan masyarakat adat Papua yang bergantung pada hasil hutan.

Dalam menghadapi tantangan ini, Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat menunjukkan komitmen untuk mempertahankan 70 persen dari total kawasan sebagai tutupan hutan, sesuai dengan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembangunan Berkelanjutan. Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat telah menyusun lima program penghijauan yang tersebar di tujuh kabupaten, dengan target penanaman 71.600 batang pohon pada tahun 2024. Target penanaman ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 35.600 batang pohon. Adapun program penghijauan ini meliputi rehabilitasi kawasan mangrove seluas 18 hektare dengan target 7.200 bibit pohon, pengembangan rehabilitasi lahan 4 hektare dengan 1.600 bibit, penghijauan lingkungan luar kawasan hutan negara seluas 128 hektare dengan 51.200 bibit, pembangunan hutan kota 7 hektare dengan 4.400 bibit, dan pembangunan hutan rakyat 18 hektare dengan 7.200 bibit pohon.

Upaya ini sejalan dengan dokumen rencana kerja FOLU Net Sink Provinsi Papua Barat, yang bertujuan menambah luas tutupan hutan dan menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu, juga mencerminkan kesadaran pemerintah daerah akan pentingnya menjaga kelestarian hutan untuk mendukung ekosistem dan keberlanjutan kehidupan masyarakat lokal. Komitmen pemerintah pusat ditunjukkan melalui upaya memberdayakan ekonomi lokal masyarakat Papua Barat melalui program perhutanan sosial. Penyerahan SK Perhutanan Sosial oleh Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, kepada 12 kelompok tani di Papua Barat menjadi langkah konkret memberdayakan ekonomi masyarakat. Program ini bertujuan memberikan akses pengelolaan hutan kepada masyarakat lokal, mendorong pemanfaatan hasil hutan nonkayu, serta mengembangkan agroforestri yang berkelanjutan. Selain itu, pelepasliaran satwa langka seperti burung kakatua yang juga menjadi simbol penting upaya melindungi keanekaragaman hayati Papua.

Tidak hanya itu, pemerintah juga menunjukkan sinergi antarkementerian untuk memperkuat pengelolaan hutan. Kolaborasi antara Kementerian Kehutanan dan Kementerian Pertahanan menjadi salah satu langkah strategis yang dilakukan pemerintah untuk pengelolaan hutan lestari dan penegakan hukum. Namun, tantangan ke depan tetap besar. Selain memastikan keberhasilan program penghijauan, pemerintah juga harus mengatasi potensi konflik lahan yang sering kali terjadi di wilayah pemekaran. Sinergi kebijakan lintas sektor menjadi kunci untuk menjawab permasalahan ini. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat adat, dan pihak swasta diperlukan untuk menciptakan tata kelola hutan yang adil dan berkelanjutan. Selain itu, pendekatan berbasis kearifan lokal harus menjadi bagian integral dari setiap program pembangunan, memastikan bahwa masyarakat adat tetap menjadi bagian dari solusi, bukan korban dari perubahan wilayah administrasi.

Secara keseluruhan, pemekaran wilayah memang membawa tantangan besar terhadap lingkungan. Namun, dengan komitmen pelestarian yang kuat, program rehabilitasi yang terukur, dan sinergi kebijakan yang melibatkan berbagai pihak, ada harapan untuk menjaga kelestarian hutan Papua Barat sambil meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Pemekaran, jika dikelola dengan bijak, dapat menjadi peluang untuk membangun sistem pengelolaan hutan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan adaptif terhadap perubahan.

Atensi DPR

DPR RI, khususnya Komisi IV, memiliki peran strategis dalam menghadapi dampak pemekaran daerah terhadap kelestarian hutan di Papua. Dalam fungsi pengawasan, Komisi IV perlu memastikan implementasi kebijakan kehutanan, seperti Perdasus Nomor 10 Tahun 2019, berjalan sesuai tujuan pelestarian hutan. DPR RI juga perlu memantau efektivitas program rehabilitasi, perhutanan sosial, dan kolaborasi lintas sektor, termasuk penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan. Dalam fungsi legislasi, Komisi IV DPR RI dapat mendorong dilakukannya revisi undang-undang yang memperkuat perlindungan hutan di wilayah pemekaran, termasuk pengelolaan berbasis kearifan lokal dan partisipasi masyarakat adat. Sementara itu, melalui fungsi anggaran, Komisi IV DPR RI dapat meminta Kementerian Kehutanan mengalokasikan dana khusus untuk rehabilitasi hutan dan pemberdayaan masyarakat. Sinergi ketiga fungsi ini penting untuk menjamin pemekaran tidak menjadi ancaman, melainkan peluang menjaga kelestarian hutan Papua.

Sumber

antaranews.com, 18 November 2024;
bisnis.com, 20 November 2024;
inews.id, 22 November 2024;
kompas.com, 19 November 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

EDITOR

Polhukam

Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman
Rachmi Suprihartanti S.

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.
Devindra R. Oktaviano

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Suhartono
Venti Eka Satya
Dewi Wuryandani
Eka Budiyantri

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PusakaBK2024